

MEMANFAATKAN DAMPAK GLOBALISASI

Perhatian dunia terhadap perkembangan ekonomi akhir-akhir ini mulai beralih ke Samudera Pacific. Kecenderungan globalisasi menyebabkan dunia menjadi satu kesatuan yang utuh. Eropah dan Amerika bukan lagi satu-satunya tempat untuk menanamkan modal.

Investor saat ini mulai memperhatikan negara di Samudera Pacific sebagai tempat untuk menanamkan modal. Negara di Samudera Pacific mulai dipertimbangkan sebagai pangsa pasar yang baik. Besarnya potensi sumber daya, tenaga kerja dan berbagai kemudahan lain merupakan salah satu daya tarik investor asing untuk menanamkan modal. Negara di Samudera Pacific mulai dianggap sebagai salah satu tujuan alternatif pengembangan investasi di masa datang.

Untuk melihat kecenderungan ini maka negara-negara di Samudera Pacific harus memanfaatkan pola pergeseran peralihan investasi ini. Dampak globalisasi perekonomian dunia bagaimanapun juga akan berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara di Samudera Pasifik. Sebagai suatu subsistem perekonomian global seharusnya negara-negara di Samudera Pasifik dapat mengantisipasi kecenderungan di atas. Bagaimana dengan Indonesia, yang merupakan salah satu negara potensial lainnya di kawasan samudera pasifik dalam memanfaatkan keadaan ini.

Secara spesifik dapat dikatakan bahwa keadaan globalisasi perekonomian dunia akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai bagian dari suatu sistem perekonomian dunia maka Indonesia harus dapat pula mengantisipasi pergeseran peralihan pola investasi asing ini. Peralihan investasi asing ke Indonesia harus diantisipasi sedini mungkin. Pengkajian perilaku investasi dari negara asal harus diamati secermat dan seakurat mungkin. Pada saat ini 43.15 % arus investasi asing datang dari Eropah dan Amerika .

Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di atas adalah dengan memperbaiki hubungan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Ini merupakan prasyarat dalam memanfaatkan kecenderungan di atas. Kerja sama yang dibentuk harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan investasi dari luar negeri. Keinginan investor asing ke Indonesia harus ditangani dengan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Swasta. Pemerintah dan swasta baik di pusat maupun di daerah harus dapat mempelajari sepak terjang keinginan investor asing dalam menanamkan modal di dalam Negeri.

Pemerintah harus dapat menjadikan swasta sebagai mitra usaha dalam memanfaatkan arus investasi asing. Penanganan prosedur pemberian izin oleh pemerintah harus didukung dengan upaya persiapan masalah perencanaan dan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan tanpa didukung penanganan prosedur yang baik akan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah maupun swasta. Konflik antara pemerintah dan swasta dapat terjadi akibat perilaku investor.

Harus disadari pula bahwa penanganan investasi asing oleh pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Seluruh hierarki pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (tingkat I dan II) akan ikut terkait. Dalam tahap pelaksanaan investor asing akan banyak terkait dengan pemerintah daerah tingkat II. Dalam tahap pemberian izin dan pengawasan investor akan banyak terkait dengan pemerintah daerah tingkat I. Sementara dalam tahap pemberian arahan/pedoman/strategi dan kebijaksanaan investor akan banyak terkait dengan pemerintah pusat.

Setiap tingkat kewenangan pemerintahan di atas harus dikoordinasikan. Kerjasama antara pemerintah pusat, Tk. I dan II harus beriringan. Peran BKPM sebagai koordinator penanganan investasi asing harus lebih dipertimbangkan. BKPM diharapkan dapat menjadi penengah yang bertugas menghindari terjadinya konflik antara kepentingan pemerintah, swasta dan investor.

Antisipasi yang dilakukan pemerintah dan swasta dapat dilakukan dengan membenahi bentuk penanganan prosedur dan peraturan perundangan. Keluhan investor terhadap perizinan yang berbelit-belit perlu dipertimbangkan untuk segera dibenahi. Demikian pula halnya dengan keluhan-keluhan peraturan dan perundang-undangan lain, yang mungkin memerlukan penanganan khusus.

Sektor Industri Strategis

Kecenderungan lain yang harus diantisipasi dari adanya dampak globalisasi ini adalah perlunya membenahi sektor industri sebagai salah satu sektor utama yang paling strategis dalam mengantisipasi pemanfaatan modal asing ke dalam negeri. Sektor industri merupakan daya tarik bagi para investor asing. Lebih kurang 74 % arus investasi asing ke dalam negeri ditanam di sektor Industri (BPS, 1988).

Bila dirinci lebih lanjut investasi asing ini sebagian besar diinvestasikan untuk industri besar dan sedang. Pada tahun 1986 investasi pada sektor industri besar dan sedang 81,85 %, sementara industri kecil 6,97 % dan industri rumah tangga 11,18 %. Dapat dilihat berapa besar peran industri besar dan sedang dalam penanaman modal di sektor industri.

Besar nilai tambah industri besar pada tahun 1986 1,57 %, industri kecil 1,54 % dan industri rumah tangga 1,55 % (Tabel 1). Industri besar dan menengah masih memberikan nilai tambah terbesar dalam peningkatan investasi. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor. Hal lain yang dapat dilihat bahwa nilai tambah industri besar ini cenderung lebih stabil dari tahun 1975 hingga tahun 1986 (berkisar 1,57 %).

TABEL 1
NILAI TAMBAH INDUSTRI BESAR/SEDANG,
INDUSTRI KECIL DAN RUMAH TANGGA
TAHUN 1974, 1979 DAN 1986

THN	BESAR/SEDANG			K E C I L			RUMAH TANGGA		
	IN	OUT	VA	IN	OUT	VA	IN	OUT	VA
1974	0,82	1,29	1,58	0,10	0,16	1,50	0,12	0,20	1,69
1979	2,97	4,63	1,56	0,41	0,60	1,45	0,46	0,75	1,64
1986	16,53	25,88	1,57	1,41	2,18	1,54	2,26	3,52	1,55
r (%)	31,45	31,31	-	26,66	26,99	-	30,77	29,73	-

Catatan :

IN : Nilai Input (dalam trilyun rupiah)

OUT : Nilai Output (dalam trilyun rupiah)

VA : Nilai Tambah / Value Added (dalam persen)

r : Tingkat Pertumbuhan per tahun (%)

Sumber : Statistik Indonesia 1988

Keadaan ini mempunyai dampak terhadap kecenderungan pengalokasian investasi. Investor akan merasa lebih aman untuk mengalokasikan dana di sektor ini. Investasi pada sektor industri besar memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 31,45 % per tahun (industri kecil dan rumah tangga berkisar 26,66 dan 30,77 %). Kecenderungan ini juga cukup menggembirakan bila dibandingkan dengan tingkat

pertumbuhan pembangunan di sektor lainnya (yang rata-rata 5 - 15 persen per tahun).

Investasi industri besar sebagian besar (36,21 %) diinvestasikan pada industri kimia, logam dan mesin. Investasi industri kecil sebagian besar (27,80 %) diinvestasikan pada industri tekstil, pakaian jadi dan kulit. Sementara investasi industri rumah tangga (52,22 %) dialokasikan pada pengolahan makanan dan minuman.

Industri kimia (bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik) sebagian besar di alokasikan di luar daerah perkotaan. Tetapi pengalokasian investasi ini umumnya masih memusat di Jawa. Pengalokasian pabrik-pabrik pengolahan kimia sebagian besar masih berada di Jawa.

Industri rumah tangga umumnya berada di daerah perkotaan dengan jumlah cukup besar 3.875 perusahaan pada 1986 (bandingkan dengan industri logam dasar 30 perusahaan dan industri pengolahan lainnya 175 perusahaan). Industri ini juga menyerap tenaga kerja 520.096 tenaga kerja pada 1986. Walaupun begitu kapasitas pemakaian tenaga kerja sangat kecil, rata-rata 3 - 4 pekerja per satu perusahaan (bandingkan dengan sektor industri logam dasar yang memakai tenaga kerja rata-rata 500 -600 pekerja per satu perusahaan).

Walaupun sektor industri bukan merupakan sektor utama yang paling besar berperan dalam meningkatkan pembangunan nasional, tetapi perlu dicatat bahwa perkembangan sangat pesat dari sektor ini perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan sistem kegiatan perekonomian nasional. Pola industri yang dapat memanfaatkan potensi asing (industri maju) dan potensi dalam negeri (industri dasar) harus dipadukan. Rumusan ini harus tetap dipertimbangkan dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Karakteristik keruangan sektor industri harus turut pula dipelajari. Industri maju yang cenderung dekat pasar dan industri pengolahan yang cenderung dekat bahan baku harus dialokasikan secara terintegrasi. Pasar yang selalu diidentikkan dengan kota dan bahan baku yang diidentikkan dengan desa harus diletakkan seimbang (proporsional dalam jumlah) dan serasi (proporsional dalam kualitas).

Untuk keadaan saat ini mungkin sangat sulit menggantikan pasar bagi teknologi maju ke daerah pedesaan. Walaupun dari segi kuantitas pasar produksi Indonesia 70 persen berada di pedesaan, tetapi kualitas kemampuan daya beli penduduk pedesaan masih sangat jauh berada dibawah penduduk perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari produk industri maju yang sebagian besar dipakai masyarakat perkotaan (seperti komputer, perabotan rumah tangga dari listrik, kendaraan, dll). Masih

dipertanyakan apakah Indonesia mungkin dapat memasyarakatkan penggunaan industri maju di pedesaan. Untuk itu kita perlu membedakan pola perkembangan industri maju di perkotaan dengan industri bahan baku di pedesaan. Keseimbangan ini harus dijaga oleh pemerintah.

Value added industri yang diakibatkan industri maju cenderung jauh di atas industri bahan baku. Investor yang cenderung berorientasi pada keuntungan akan memilih industri maju sebagai objek untuk mengembangkan investasi. Industri bahan baku akan terus makin tertinggal dengan industri maju. Konsekwensinya perkembangan daerah pedesaan (yang didominasi industri bahan baku) akan terus makin tertinggal dengan perkembangan daerah perkotaan (industri maju).

Karakteristik pasar bagi masing-masing jenis industri harus pula diperhatikan secara seksama. Anehnya walaupun penduduk Indonesia 70 persen masih berada di pedesaan, investor menganggap daerah ini bukan pasar bagi produk industrinya. Kemampuan penduduk pedesaan memiliki kemampuan yang rendah untuk produk industri, terutama untuk industri-industri maju.

Untuk itu usaha pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyeimbangkan pertumbuhan industri di pulau Jawa dan luar Jawa. Untuk masa datang hal ini dapat membantu mengurangi beban keseimbangan pertumbuhan yang terlalu besar antara Jawa dan luar Jawa. Bila hal ini dibiarkan kecenderungan menjadikan Jawa sebagai pulau industri di masa datang akan dapat saja terjadi.

Dengan cara ini diharapkan daerah-daerah lain akan dapat mengurangi beban pembangunan industri yang terlalu berlebihan di pulau Jawa. Pendistribusian sektor industri ke daerah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi harus didorong.

Globalisasi Industri

Globalisasi membawa dampak yang makin kuat pada pembangunan di Indonesia. Fokus yang perlu diperhatikan adalah sektor industri. Globalisasi sangat mempengaruhi kegiatan industri di tanah air. Harga lahan, biaya pembangunan fasilitas dan tenaga kerja yang murah akan diantisipasi investor asing sebagai aset untuk mengembangkan industri di Indonesia.

Lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan timbulnya kegiatan- kegiatan industri di kota-kota besar. Kota besar masih menjadi daya tarik pengalokasian dana untuk sektor industri. Apabila pemerintah tidak turun tangan maka pengembangan sektor industri (pengaliran investasi dari luar negeri) akan terus mengalir ke kota besar.

Kecenderungan pengalokasian investasi asing pada sektor industri ini kelihatannya terus meningkat hingga pada akhir-akhir tahun ini.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku investasi asing ini di pulau Jawa sehingga kelihatannya polanya terus mengalir pada beberapa tempat dan beberapa sektor saja. Diversifikasi pengalokasian investasi sebaiknya perlu diarahkan mengacu pada aspek lokasi dan jenis investasi.

Dengan alasan di atas perlu dikaji lebih lanjut pencarian alternatif potensi lain yang dapat dikembangkan sebagai sasaran pengalokasian

investasi asing di Indonesia. Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana caranya meyakinkan investor asing untuk dapat mengalihkan investasinya pada sektor di luar sektor industri (seperti sektor pariwisata, perumahan, energi, pengembangan sumber daya daerah, dll)

Dari tabel 3 dan 4 terlihat bahwa potensi sektor pertambangan banyak terdapat di pulau Sumatera (26,67 %). Walaupun potensi sektor ini besar di pulau tersebut, tetapi daya tarik investasinya relatif kecil (0,4 juta dolar atau 0,3 %) dari total investasi yang terdapat di pulau ini.

TABEL 4
DISTRIBUSI INVESTASI ASING TAHUN 1986/1987 PER SEKTOR
(Juta US Dollar)

	J A W A	SUMATRA	KALIMANTAN	SULAWESI	PULAU LAIN	NASIONAL
Total Investasi	67,03	16,59	6,58	4,73	5,07	100,00
Sektor Pertanian	52,25	24,56	8,41	9,10	5,68	100,00
Sektor Pertambangan/Energi	33,33	26,67	6,67	-	33,33	100,00
Sektor Perindustrian	78,58	12,11	5,61	1,71	1,99	100,00
Sektor Konstruksi	63,42	22,09	3,56	5,94	4,19	100,00
Sektor Perdagangan	65,95	22,16	2,16	8,65	1,08	100,00
Sektor Perhubungan	26,86	30,28	10,14	16,29	16,43	100,00
Sektor Keuangan	51,53	15,68	11,41	4,68	16,70	100,00
Sektor Sosial	51,60	21,60	7,20	9,60	10,00	100,00

Sumber : Statistik Indonesia 1988

Upaya pemanfaatan sektor pertambangan dan energi di pulau Sumatera melalui peningkatan kemampuannya memanfaatkan investasi asing harus dapat lebih digalakkan. Potensi bahan tambang dan mineral yang banyak terdapat di Umbilin, Sawahlunto, Indarung, Dumai, Arun, dll harus dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi asing di Sumatera.

Sementara untuk sektor perhubungan, daya tarik pulau Sulawesi cukup besar dibandingkan dengan potensi sektor perhubungan di pulau lain (30,08 %). Peran sektor industri hanya 22,16 % di pulau Sulawesi, sementara peran sektor pertanian 24,54 %. Besarnya peran investasi asing pada sektor perhubungan di pulau Sulawesi banyak ditujukan untuk menghubungkan daerah-daerah terisolasi yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan (pulau Buton, Pomala, dll).

Pola Perkembangan Sektor Industri Dalam Dimensi Ruang

Industri besar dan menengah di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Jawa (lebih kurang 80% dari total tenaga kerja). Akan tetapi pada perkembangan terakhir ada kecenderungan beralih ke luar Jawa. Terkonsentrasinya industri ini di pulau

Jawa erat kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap industri substitusi impor. Dengan ditekannya pengembangan industri pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, industri substitusi impor berkembang di Indonesia, khususnya pada daerah yang padat penduduknya, seperti Pulau Jawa dimana lokasi produsen dekat dengan konsumen. Sedangkan di luar Jawa kebijaksanaan pengembangan industri lebih berorientasi ekspor sumber daya alam.

Penyerapan tenaga kerja sektor industri di daerah perkotaan pulau Jawa relatif sama besarnya, sedang nilai tambahnya lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa industri di daerah perkotaan di Jawa cenderung padat modal, sehingga menimbulkan seleksi tenaga kerja terampil. Penyerapan tenaga kerja di luar Jawa lebih kecil dibandingkan nilai tambahnya, berarti cenderung padat modal dan menggunakan teknologi tinggi. Orientasi industri tersebut adalah pada sumber daya alam. Peranan daerah perkotaan belum menonjol kecuali di Sumatera.

Struktur industri di Jawa berada pada industri hilir (up stream industries), sedangkan di luar Jawa berada

pada industri hulu (down stream industries). Kedua struktur ini terpisah dan mempunyai perbedaan yang cukup besar serta belum mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Perbedaan ini dapat diatasi melalui peningkatan interaksi ruang antara Jawa dan luar Jawa melalui modus kegiatan industri. Interaksi tersebut mungkin terjadi apabila kebijaksanaan pengembangan industri diarahkan untuk menjalin hubungan keterkaitan antara industri hulu (di luar Jawa) dengan hilir (di Jawa). Pola pengembangan industri hilir di luar Jawa diperkirakan dapat terjadi mengingat industri hulunya telah lebih dahulu berkembang dan dapat menjadi landasan bagi pengembangan industri hilir.

Berdasarkan pengalaman di Jawa, bahwa industri hilir berkembang di daerah-daerah perkotaan, maka diharapkan daerah-daerah perkotaan di luar Jawa dapat menunjang pengembangan industri hilir yang lebih berorientasi pada konsumen. Tentu saja apabila keadaan tersebut dapat direalisasikan, penyediaan prasarana dan sarana, investasi, penyediaan tenaga kerja, dan sebagainya perlu diperhatikan di kota-kota yang bersangkutan.

Beberapa Pandangan Dalam Konteks Tata Ruang Pengembangan Industri

Karena masalah pengembangan industri bagi suatu negara kepulauan sangat sensitif terhadap isu keterpaduan dan kesatuan, maka penekanan pembahasan masalah pembangunan seharusnya tidak dapat dilepaskan pada pembahasan masalah kesatuan tata ruang. Keterpaduan pembangunan antar pulau harus dijalin dengan menyusun suatu strategi yang terintegrasi.

Keterpaduan pembangunan antar pulau melalui penanganan strategi yang terarah untuk kesatuan dan keterpaduan perlu dilakukan. Beberapa fenomena yang dapat dilihat dari keadaan pembangunan di Indonesia pada saat ini dapat dilihat sebagai berikut:

Intensitas perhubungan antar kota selama tiga Pelita umumnya tidak mengalami perkembangan yang menyolok, kecuali beberapa kota di pulau Sumatera dan Sulawesi. Perkembangan hubungan kota-kota yang pesat terjadi di pulau Jawa. Pulau Sumatera mengalami perkembangan di beberapa kota di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang dan Tanjung Karang. Jika dilihat dari aktivitas pelabuhan, pola kecenderungan perhubungan antar kota menggeser ke wilayah Indonesia Bagian Timur. Simpul aktivitas

perhubungan di daerah tersebut adalah Ambon, Manado dan Kupang.

Distribusi ruang dari kota-kota yang menjadi pusat aktivitas, sebagian besar mengelompok di wilayah Indonesia Barat dan mengarah ke wilayah perairan dalam laut Indonesia. Polanya berbentuk linier di sepanjang pantai dan kecenderungannya kini mulai menyebar lebih merata ke arah Indonesia Timur.

Akibat adanya interaksi antar pulau yang baik maka ada kecenderungan pola pergerakan orang dan barang di Sumatera mengarah ke Timur, di pulau Jawa mengarah ke Utara, di pulau Kalimantan mengarah ke Selatan, di pulau Sulawesi mengarah ke semua arah dan di pulau-pulau di Indonesia Timur mengarah ke Barat. Kecenderungan pola aliran orang dan barang ini harus diantisipasi untuk mengarahkan kegiatan pembangunan di masa datang.

Kesimpulan

Dampak globalisasi dunia yang mengarah ke negara-negara di samudera pasifik harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Upaya mengantisipasi pergeseran arus investasi harus dilakukan dengan membenahi kerjasama yang baik antara berbagai pihak, yakni pemerintah dan swasta.

Pemanfaatan investasi dari luar negeri sangat erat kaitannya dengan penanganan masalah kegiatan di sektor industri, karena sektor industri paling banyak menyerap dana investasi asing. Kegiatan industri besar, menengah dan kecil harus ditata dalam konteks keruangan yang memperhatikan wilayah kepulauan Indonesia sebagai suatu kesatuan.

Pemerintah sebaiknya dapat mengarahkan arus investasi asing di ke daerah-daerah lain di luar pulau Jawa yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Pulau Sumatera ternyata sangat potensial untuk kegiatan di sektor pertambangan, sementara pulau Sulawesi sangat potensial untuk kegiatan sektor perhubungan.

Pemanfaatan arus investasi asing ke Indonesia sebaiknya tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh sektor industri saja. Sektor-sektor lain diharapkan dapat juga memanfaatkan tingginya arus investasi asing ini. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggali kemungkinan pengembangan potensi pada berbagai sektor di berbagai daerah yang sampai saat ini masih belum tersentuh oleh kemungkinan pengembangan.

baru sebagian kecil saja yang telah ditata dan dikelola "agak" profesional. Selebihnya, relatif masih alami, bahkan beberapa diantaranya cenderung memudahkan daya tariknya. Disinilah letak persoalannya. Sebab, jika tidak segera diselamatkan, boleh jadi kepunahan tak dapat dielakkan.

Prospek perkembangan pariwisata Cirebon jelas cukup cerah. Peluang pengembangan pariwisata daerah jelas semakin terbuka. Terlebih untuk daerah Cirebon yang memiliki pesona wisata cukup kaya, beragam dan unik. Dan Cirebon berada dalam jarak terjangkau yang relatif mudah dicapai dari Jakarta maupun Bandung.

Kecerahan prospek pariwisata daerah ini, selain terbukanya peluang serta potensi kepariwisataannya, juga telah didukung berbagai fasilitas penunjang. Mulai dari sarana dan prasarana transportasi, akomodasi, komunikasi hingga jaminan keamanan dan ketertiban dapat dinilai telah siap menyambut wisatawan.

Cirebon dapat dijangkau lewat darat dengan kondisi jalan lurus, juga melalui udara bandara yang kian ditingkatkan statusnya. Jaringan transportasi sudah menjangkau hampir ke seluruh obyek yang patut dikunjungi, dengan pilihan mode cukup beragam. Waktu tempuh ke berbagai objek dari pusat kota Cirebon rata-rata berkisar 60-90 menit, cukup ideal untuk perjalanan wisata.

Demikian pula lokasi objek yang menarik untuk dikunjungi cukup tersebar, sehingga sangat memungkinkan menghindari "back road" yang kurang disukai dalam suatu perjalanan wisata. Disamping itu, kondisi demikian juga memungkinkan penawaran pilihan paket perjalanan wisata lebih beragam. Dan semakin banyak pilihan yang ditawarkan, tentu akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Soal akomodasi, barangkali Cirebon hanya kalah oleh Bandung. Hotel berbintang, bahkan bintang 5, ada di kota ini. Sedikitnya hotel di kota ini dapat menampung 300-an tamu. Belum lagi terhitung belasan hotel non bintang di dalam dan luar kota. Supermarket bakal terdapat empat, kini dua diantaranya sudah berjalan. Bar, diskotek, restoran hingga kedai tersebar di pelosok kota. Malah untuk jajanan khas, kini tak perlu lagi bersusah-susah mencarinya, karena sudah dipusatkan di "Pujagalana".

Untuk fasilitas komunikasi, boleh dikatakan Cirebon telah melengkapinya. Pelayanan hubungan lokal, regional hingga internasional dapat dilakukan dengan mudah. Malah belum lama ini pihak Perumtel telah menyebarkan puluhan telepon umum di berbagai pelosok kota agar mudah dijangkau.

Perkembangan Pariwisata Cirebon

Mengapa pariwisata Cirebon tidak berkembang?

Ketika pertanyaan itu dilontarkan, Kepala Dinas Pariwisata Kodya Cirebon, **Ari Muslihudin**, langsung menukas. Persepsi yang menganggap pariwisata Cirebon tidak berkembang, katanya, adalah keliru. Pariwisata Cirebon sudah berkembang, hanya saja masih belum didukung oleh sektor ekonomi lainnya.

Lantas, bagaimana pola yang diterapkan? Sejauh mana koordinasi dilancarkan?

Diparda saat ini tengah menata objek wisata. Selain itu, sejumlah pemandu wisata kini sedang dididik di Bandung, sebab selama ini di Cirebon belum ada pemandu wisata yang profesional. Diharapkan, langkah ini ditunjang instansi lain, seperti Depdikbud yang membina atraksi wisata serta Perindustrian yang menggalakkan produksi cenderamata.

Selain koordinasi dengan instansi terkait, juga kerja sama antar dinas pariwisata se-Wilayah II Cirebon. Sejauh ini, demikian Ari Muslihudin, kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kegiatan promosi bersama. Tidak dirinci bagaimana bentuk promosi, di mana dan seberapa tinggi intensitasnya.

Untuk konsumsi wisatawan asing, paket apa saja yang sudah ditawarkan?

"*One day tour*"! Rutenya: Cirebon-Gunung Jati-Keraton-Sunyaragi-Linggarjati. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya paket itulah yang ditawarkan. Tidak pernah berubah, termasuk rute perjalanan wisatanya. Dan menurut catatan, wisatawan asing yang berkunjung ke Cirebon pada 1989 mencapai 9.000 orang lebih.

Barangkali uraian singkat hasil wawancara tersebut sudah dapat meluruskan perbedaan persepsi menyangkut pariwisata Cirebon: "tidak berkembang" atau "sudah berkembang"!

Peluang Pemasaran

Terlepas dari "*tidak*" atau "*sudah*" berkembang, yang jelas peluang, potensi dan prospek kepariwisataan Cirebon yang demikian unggul patut disayangkan jika hanya dipasarkan dalam paket "*one day tour*". Kesempatan untuk memasarkan lebih dari itu, sebenarnya terbuka lebar.

Mengapa tak dimanfaatkan optimal?

Dalam strategi pemasaran pariwisata, dikenal rumusan "*semakin banyak pilihan yang ditawarkan, semakin menarik*". Nah, karenanya, mengapa tidak ditawarkan juga "*two days, three days, four days...*" dan seterusnya. Mengapa pula rute perjalanan "*one day tour*" tidak ditawarkan yang berbeda, kecuali seperti di atas. Bukankah potensi sumber daya

pariwisata di daerah ini sangat mendukung.

Memang, menyusun suatu paket wisata tidaklah mudah, terlebih bila ditujukan untuk konsumsi wisatawan asing. Juga, tidak setiap objek wisata, atraksi budaya serta cenderamata layak dipasarkan. Dan sudah barang tentu merangkai rute perjalanan wisata dalam suatu paket, tidak semudah menggoreskan spidol di atas peta.

Studi mendalam, memakan waktu lama dan dukungan dana tentunya dibutuhkan untuk menyusun berbagai paket wisata. Namun apapun alasannya, jika memang berniat memajukan pariwisata, maka jalan itu harus ditempuh. Dengan semakin banyak pilihan yang ditawarkan, sekali lagi, jelas akan semakin menarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Kendala memang senantiasa ada, bahkan kerap menyulitkan. Namun jalan terobosanpun sebenarnya selalu terbuka, asalkan jeli dalam melihatnya. Dalam hal ini, barangkali keterbukaan diperlukan guna menampung berbagai masukan yang berarti, yang dapat mengantarkan menuju suatu jalan terobosan.

Paket wisata adalah suatu bentuk produk yang dapat dipasarkan. Agar oleh dapat diterima konsumen secara luas, tentunya produk itu harus dirancang sesuai kebutuhan dan selera seluruh lapisan konsumen.

Dengan demikian, perancangan paket wisata harus seiring dengan pengamatan dan penelitian karakteristik wisatawan. Dalam kaitan ini, tentunya wisatawan perlu digolongkan terlebih dahulu, misalnya wisatawan asing dan wisatawan nusantara. Wisatawan asingpun harus dipilih, misalnya asal Amerika, Eropa, Asia dan seterusnya. Demikian pula wisatawan nusantara, misalnya saja harus dibedakan antara intra propinsi dan inter propinsi.

Keragaman paket wisata yang memberikan keleluasaan dalam memilih, juga dituntut disajikan dalam berbagai versi mengingat karakteristik wisatawan bersifat heterogen.

Semakin tidak sederhana saja penyusunan suatu paket wisata. Heterogenitas wisatawan menuntut kejelian prima dalam merangkai sejumlah objek menjadi suatu paket yang memenuhi selera. Dan untuk wisatawan asing, boleh jadi juga wisatawan nusantara, selain menuntut suatu paket yang mengesankan, juga kerincian materi objek, lama perjalanan dari suatu objek ke objek lainnya, lama tinggal, hingga setiap komponen biaya yang harus dikeluarkan.

Ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan, yakni kedudukan pariwisata Wilayah III Cirebon terhadap pariwisata Jawa Barat. Sebab, kembali ke

prinsip semakin banyak ditawarkan akan semakin menarik wisatawan, maka perancangan paket wisata dalam lingkup Jawa Barat secara terpadu mesti ditempuh juga.

Dengan demikian, selain mempertimbangkan keunggulan serta kekhasan karakteristik sumber daya pariwisata secara lokal (lingkup wilayah pembangunan), juga kajian makro tak dapat diabaikan begitu saja. Disamping akan memberikan lebih banyak pilihan dan daya tarik, penggarapan secara terpadu dalam lingkup makro cenderung akan lebih meringankan. Dan kemungkinan untuk berhasilpun nampaknya jauh lebih besar.

Hanya saja, dalam kaitan itu, umumnya terhadap kelemahan aspek koordinasi antar instansi maupun antar daerah. Sekedar sebagai usulan awal, barangkali dapat dikaji kemungkinan pembentukan semacam "*badan otorita pariwisata*" yang melibatkan unsur swasta.

Seperti beberapa kali ditayangkan TVRI tentang ucapan mantan Menlu *Mochtar Kusumaatmadja* di pameran KIAS, bahwa di AS serba partikular, sedang di kita sebaliknya. Barangkali, setelah keterlibatan swasta dalam pengelolaan objek wisata, sarana akomodasi dan biro perjalanan, tak salah jika dikaji kemungkinan perluasan peranannya dalam memajukan sektor pariwisata.

Kembali ke masalah pariwisata Cirebon, amatlah menggembirakan jika bermaksud merintis ke arah pengembangan pariwisata secara terpadu dan profesional.

Jika untuk merancang berbagai paket wisata pilihan yang disesuaikan dengan heterogenitas wisatawan masih terlampau jauh dari jangkauan, maka setidaknya langkah awal menuju ke arah itu memungkinkan untuk dirintis. Langkah awal itu dapat berupa inventarisasi sumber daya pariwisata dan analisis potensi serta kondisinya. Lebih jauh, tentu akan lebih merangsang jika dapat disusun semacam rencana induk pengembangan pariwisata (skenario pengembangan).